

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INVESTASI
SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi Strata Satu (S1)



Oleh :

TOMI AGUSTA PUTRA

BP. 2007/84955

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INVESTASI SEKTOR
PERTANIAN DI INDONESIA

Nama : Tomi Agusta Putra
BP/NIM : 2007/84955
Keahlian : Perencanaan Ekonomi
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

Padang, 03 September 2012

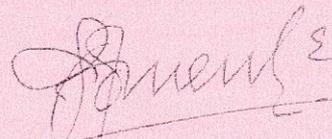
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. H. Hasdi Aimon, M.Si
NIP. 19550505 197903 1 010

Pembimbing II



Drs. Akhirmen, M.Si
NIP. 19621105 198703 1 002

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan



Drs. H. Ali Anis, M.S
NIP. 19591129 198602 1 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

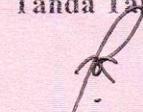
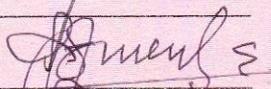
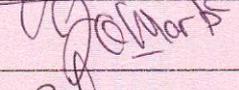
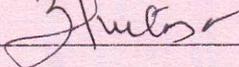
*Dinyatakan lulus setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Program Studi
Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INVESTASI SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA

NAMA : Tomi Agusta Putra
BP/NIM : 2007/84955
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Progam Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

Padang, 03 September 2012

Tim Penguji

No. Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Dr. H. Hasdi Aimon, M.Si	1. 
2. Sekretaris	: Drs. Akhirmen, M.Si	2. 
3. Anggota	: Joan Marta, SE, M.Si	3. 
4. Anggota	: Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S	4. 

SURAT PERNYATAAN

(Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana S1)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tomi Agusta Putra
NIM/BP : 84955/2007
Tempat/ Tgl Lahir : Bukittinggi/09 Agust 1989
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Ngurah Rai No 7 Polonia, Air Tawar Timur, Padang
No. HP/Telp. : 081993919155
Judul Skripsi : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi Sektor Pertanian di Indonesia

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis (skripsi) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademi (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, Agust 2012

Yang menyatakan

METERAI
TEMPEL
BUKAL MEMERANGEN BANGSI
TGL.



EF583AAF000018051
ENAM RIBU RUPIAH

6000



Tomi Agusta Putra

NIM. 84955

ABSTRAK

Tomi Agusta Putra, (2007/84955): Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi Sektor Pertanian di Indonesia. Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dibawah Bimbingan Bapak Dr. H. Hasdi Aimon, M.Si dan Bapak Drs. Akhirmen, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh Output Sektor Pertanian terhadap Investasi Sektor Pertanian di Indonesia. (2) Pengaruh Indeks Harga Pedagang Besar Sektor Pertanian Terhadap Investasi Sektor Pertanian di Indonesia. (3) Pengaruh Kebijakan Pemerintah Sektor Pertanian Terhadap Investasi Sektor Pertanian di Indonesia. (4) Pengaruh Output Sektor Pertanian, Indeks Harga Pedagang Besar Sektor Pertanian dan Kebijakan Pemerintah Sektor Pertanian Terhadap Investasi Sektor Pertanian di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif dan Asosiatif, dimana penulis hanya menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Output Sektor Pertanian, Indeks Harga Pedagang Besar Sektor Pertanian dan Kebijakan Pemerintah Sektor Pertanian, sedangkan variabel terikatnya adalah Investasi Sektor Pertanian di Indonesia. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif dan data *Time Series* dari tahun 1980-2010. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode regresi dan estimasi OLS (*Ordinary Least Square*), pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Output Sektor Pertanian berpengaruh signifikan terhadap Investasi Sektor Pertanian di Indonesia ($t_{\text{statistik}} = 12,24788 > \text{nilai } t_{\text{tabel}} = 2,0518$) dengan prob $0,0000 < \alpha = 0,05$ dengan tingkat pengaruh 2,078492. (2) Indeks Harga Pedagang Besar Sektor Pertanian berpengaruh signifikan terhadap Investasi Sektor Pertanian di Indonesia ($-t_{\text{statistik}} = -6,739912 < -t_{\text{tabel}} = -2,0518$) dengan prob $0,0000 < \alpha = 0,05$ dengan tingkat pengaruh -0,013096. (3) Kebijakan Pemerintah Sektor Pertanian berpengaruh signifikan terhadap Investasi Sektor Pertanian di Indonesia ($t_{\text{statistik}} = 6,351898 > \text{nilai } t_{\text{tabel}} = 2,0518$) dengan prob $0,0000 < \alpha = 0,05$ dengan tingkat pengaruh 2,225335. (4) Output Sektor Pertanian, Indeks Harga Pedagang Besar Sektor Pertanian dan Kebijakan Pemerintah Sektor Pertanian secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Investasi Sektor Pertanian di Indonesia ($F_{\text{statistik}} = 57,35693 > F_{\text{tabel}}$ sebesar 2,960). Sumbangan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 86,437 persen dan sisanya 13,563 persen lainnya ditentukan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model analisis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka disarankan kepada pemerintah untuk (1) memacu perkembangan pertumbuhan output sektor pertanian sebagai salah satu penentu investasi pada sektor pertanian (2) pemerintah perlu menjaga kestabilan indeks harga produk pertanian kredit untuk menarik minat investor untuk berinvestasi.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan pada ALLAH SWT karena atas izin dan karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Kemudian shalawat beriringan salam tidak lupa penulis hadiahkan kepada arwah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Skripsi ini berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi Sektor Pertanian di Indonesia”. Penulisan skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan yang banyak dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Dr. H. Hasdi Aimon, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Akhirmen, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan-masukan kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini.

Seiring dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan fasilitas kuliah dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak dan Ibuk Dosen penguji skripsi yaitu Bapak Joan Marta, SE, M.Si dan Ibuk Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S

3. Bapak Drs. H. Ali Anis, M.S selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan, dan Ibuk Novya Zulfa Riani, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan penelitian sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
5. Staf administrasi program studi Ekonomi Pembangunan, Staf Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan pegawai pustaka yang telah membantu penulis dalam pengurusan surat-surat untuk kelancaran penulisan skripsi dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk meminjamkan buku di perpustakaan Fakultas Ekonomi dan perpustakaan Universitas Negeri Padang.
6. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat beserta Staf yang telah membantu kelancaran bagi penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam skripsi ini.
7. Pimpinan Bank Indonesia Propinsi Sumatera Barat yang telah membantu penulis dalam pengambilan data.
8. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai dan hormati serta semua keluarga besar yang telah memberikan do'a dan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Rekan-rekan seperjuangan di Ekonomi Pembangunan angkatan 2007 yang telah memberikan dorongan moral kepada penulis

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta semua pihak yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyaknya kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang nantinya dapat menyempurnakan skripsi ini.

Akhirnya dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penulis, semoga ALLAH SWT memberikan balasan yang setimpal dan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Juli 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Pembatasan Masalah.....	11
D. Perumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	
1. Konsep dan Teori Investasi.....	14
2. Ruang Lingkup dan Ciri-Ciri Umum Pertanian.....	20
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi Sektor Pertanian	
a. Output Sektor Pertanian.....	24
b. Indeks Harga Pedagang Besar Sektor Pertanian.....	26

c. Kebijakan Pemerintah Sektor Pertanian	29
B. Penelitian Terdahulu yang Relevan	33
C. Kerangka Konseptual.....	35
D. Hipotesis	36

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	38
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	38
C. Jenis Data dan Variabel.....	38
D. Definisi Operasional	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Analisis Data.....	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Daerah Penelitian

a. Keadaan Geografis Indonesia	51
b. Keadaan Penduduk	53
c. Perkembangan Sektor Pertanian	57

2. Deskripsi Variabel

a. Deskripsi Perkembangan Investasi Sektor Pertanian di Indonesia	61
b. Deskripsi Perkembangan Output Sektor Pertanian di Indonesia.....	65
c. Deskripsi Perkembangan Indeks Harga Pedagang Besar Sektor Pertanian di Indonesia.....	69
d. Deskripsi Perkembangan Kebijakan Pemerintah Sektor Pertanian di Indonesia	73

3. Analisis Induktif	
a. Uji Asumsi Klasik	
1) Uji Multikolinearitas	77
2) Uji Autokorelasi.....	78
3) Uji Heteroskedastisitas	80
b. Analisis Regresi Linear Berganda	81
c. Koefisien Determinasi (R^2).....	83
d. Uji Stasioner.....	83
e. Pengujian Hipotesis	
1) Uji t	85
2) Uji F	86
B. Pembahasan	
1. Pengaruh Output Sektor Pertanian Terhadap Investasi Pada Sektor Pertanian di Indonesia.....	87
2. Pengaruh Indeks Harga Pedagang Besar Sektor Pertanian Terhadap Investasi pada Sektor Pertanian di Indonesia	89
3. Pengaruh Kebijakan Pemerintah Sektor Pertanian Terhadap Investasi pada Sektor Pertanian di Indonesia	91
4. Pengaruh Output Sektor Pertanian, Indeks Harga Pedagang Besar Sektor Pertanian dan Kebijakan Pemerintah Sektor Pertanian terhadap Investasi pada Sektor Pertanian di Indonesia.....	92
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan.....	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perkembangan PDB Sektor Pertanian Indonesia Tahun 2002-2010.....	7
2. Investasi Sektor Pertanian dan Indeks Harga Pedagang Besar Sektor Pertanian di Indonesia	8
3. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Indonesia	55
4. Populasi Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Pekerjaan yang Dilakukan Tahun 2010	59
5. Perkembangan Investasi Sektor Pertanian di Indonesia (Milyar Rupiah)	62
6. Perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) Sektor Pertanian Di Indonesia (Milyar Rupiah).....	66
7. Perkembangan Indeks Harga Produk Pertanian di Indonesia	70
8. Hasil Estimasi Untuk Uji Multikolinearitas	77
9. Hasil Estimasi Untuk Uji Autokorelasi.....	79
10. Hasil Estimasi Untuk Uji Heterokedastisitas	80
11. Hasil Estimasi Regresi Linear Berganda	81
12. Hasil Estimasi Uji Stasioner dengan ADF-Test	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi Sektor Pertanian di Indonesia	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Tabulasi Data.....	100
2. Uji Multikolinearitas.....	102
3. Uji Autokorelasi	104
4. Uji Heterokedastisitas dengan Uji Park.....	105
5. Hasil Estimasi Regresi Linear Berganda	106
6. Uji Stasioner	107
7. Tabel t	115
8. Tabel F	118
9. Tabel Chi Kuadrat.....	121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan sektor pertanian tetap mempunyai peran penting dalam menghadapi perkembangan perekonomian pada masa mendatang, khususnya dalam penyediaan lapangan kerja dan pangan yang berkaitan dengan ketahanan pangan (*food security*). Ada negara-negara di dunia dapat hidup dan berkembang tanpa memiliki sektor pertanian yang kuat. Jika hal tersebut terjadi di Indonesia konsekwensinya adalah negara harus menyediakan banyak devisa guna mengimpor produk-produk pertanian, karena kebutuhan produk tersebut sangat besar. Akibatnya dana yang tersedia untuk proyek-proyek pembangunan menjadi lebih sedikit, hal tersebut dapat menekan laju pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah terus mengupayakan usaha-usaha dalam penciptaan kesejahteraan rakyat. Hal ini merupakan amanat yang telah diembankan oleh pemerintah. Di dalam rangka mencapai sasaran tersebut, pemerintah terus melakukan berbagai upaya pengembangan di segala bidang. Oleh karena itu, tentu saja pemerintah memerlukan sumber pembiayaan dana untuk membiayai pembangunan. Sumber pembiayaan pembangunan dapat berasal dari sumber dalam negeri dan luar negeri.

Sumber dari dalam negeri yang diandalkan pemerintah selama ini berasal dari penerimaan berbagai pajak, ekspor migas dan non-migas dan

kelebihan dari potensi daerah yang beranekaragam. Sedang dari luar negeri umumnya dapat berupa pinjaman luar negeri langsung, investasi langsung dari luar negeri (*foreign direct investment*-FDI) dan investasi asing portofolio. Berbagai sumber dari pembiayaan tersebut yang paling mendapatkan perhatian besar adalah upaya untuk mengoptimalkan penggunaan sumber pembiayaan yang berasal dari dalam negeri sebagai upaya untuk mandiri. Sedangkan alternatif pembiayaan yang berasal dari luar negeri seyogyanya dapat bersumber dari sumber pembiayaan yang efisien dan dapat didayagunakan dengan efektif.

Dalam melaksanakan pembangunan tersebut, tentu sangat membutuhkan dana pembangunan yang sangat besar yang tidak terlepas dari peranan investasi sebagai sumber dana atau modal dalam pembangunan. Investasi dipandang sebagai salah satu faktor dan sekaligus faktor utama di dalam pembangunan ekonomi, yang diupayakan menjadi wadah mentransformasikan sumber daya potensial menjadi kekuatan ekonomi riil. Sumber daya alam yang ada di masing-masing daerah diolah dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara adil dan merata.

Investasi adalah salah satu faktor penting penentu keberhasilan pembangunan ekonomi. Keberadaannya merupakan modal dasar bagi perwujudan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan meningkatkan jumlah investasi akan berdampak terhadap pertumbuhan

ekonomi, dengan tumbuh dan berkembangnya ekonomi dengan baik maka angka kemiskinan dapat dikurangi.

Dalam jangka panjang, bila dibarengi dengan peningkatan daya saing, investasi akan meningkatkan penawaran melalui peningkatan stok kapital yang pada gilirannya akan meningkatkan pula kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output atau melakukan kegiatan-kegiatan produksi. Kegiatan produksi tersebut akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan proses tersebut pada akhirnya meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi.

Dengan bentang geografisnya yang luas hingga meliputi tiga zona waktu, wilayah Indonesia terdiri dari perairan dan daratan yang di dalamnya terkandung berbagai sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Keragaman ini seharusnya merupakan modal potensial sebagai daya tarik investasi. Namun perlu diingat bahwa daya tarik investasi suatu negara atau suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta, dan yang lebih penting lagi, tidak selalu tergantung dari ketersediaan SDA dan tenaga kerja yang murah tetapi juga adanya infrastruktur yang memadai, insentif, dan kondisi kelembagaan yang menyediakan kemudahan iklim usaha. Kombinasi ketersediaan faktor-faktor tersebut akan menciptakan kekuatan yang solid untuk meningkatkan daya tarik investasi dan daya saing daerah. Dinamika kemampuan daerah-daerah dalam mengembangkan potensi unggulannya, baik secara agregat maupun sinergi antar daerah selanjutnya akan meningkatkan daya saing nasional.

Untuk mencapai suatu pertanian yang maju, efisien, dan tangguh sehingga makin mampu meningkatkan dan menganekaragamkan hasil, meningkatkan mutu dan derajat pengolahan produksi, dan menunjang pembangunan dapat dilakukan dalam bentuk Diversifikasi, Intensifikasi, dan Ekstensifikasi pertanian yang penyelenggaraannya diupayakan lebih terpadu dan disesuaikan dengan kondisi tanah, air, dan iklim, pola tata ruang, serta upaya pelestarian lingkungan hidup.

Lapangan usaha pertanian sangat dominan dalam penyerapan tenaga kerja, kegiatan produksi lapangan usaha pertanian sebagian besar masih mengikuti pola tradisional dengan tingkat produktifitas dan tingkat pendidikan tenaga kerjanya masih sangat rendah. Walaupun dengan karakteristik seperti ini karena perannya masih sangat dominan dalam menyerap tenaga kerja maka pengembangan lapangan usaha ini masih perlu diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan terutama untuk mengurangi jumlah penduduk yang menganggur akibat tidak tertampung pada sektor lain.

Terbatasnya dana yang dimiliki serta semakin meluasnya spektrum pembangunan memaksa pemerintah untuk bisa melaksanakan kegiatan investasi secara cermat, baik mengenai prioritas maupun dampaknya terhadap investasi swasta. Karena proses pembangunan merupakan proses yang saling terkait antara satu sektor yang satu dengan yang lainnya. Ketinggalan satu sektor dalam pembangunan akan mengakibatkan pertumbuhan pembangunan yang tidak seimbang dan tidak kokoh.

Selama ini dana-dana pembangunan, baik yang berasal dari penanaman modal asing dan swasta nasional, hutang luar negeri maupun dana-dana pemerintah, lebih banyak diinvestasikan ke sektor industri, karena pembangunan di sektor pertanian dianggap kurang dapat mempercepat kemajuan suatu negara. Padahal, sektor industri akan berjalan dengan baik, ketika sektor pertanian sebagai sektor dasar bagi perekonomian Indonesia tumbuh dan berkembang dengan tangguh.

Diperlukan peran pemerintah dalam upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan seimbang khususnya sektor pertanian, baik melalui PMDN maupun PMA, yang diusahakan tidak hanya melalui sejumlah deregulasi dan debirokrasi saja. Namun juga melalui pembangunan infrastruktur, stabilitas ekonomi/moneter dan upaya peran serta lembaga-lembaga keuangan atau perbankan dalam memobilisasi dana masyarakat.

Di era pemerintahan sekarang ini, pemerintah mencoba memahami bahwa lahan yang berpotensi yang tidak produktif di Indonesia masih sangat luas, sistem pertanian yang ada sekarang ini masih belum efektif dan efisien dari mulai proses awal sampai pada saat panen dan pasca panen sehingga masih perlu diintensifkan sehingga dapat memberikan hasil yang optimum. Untuk itu, pemerintah berusaha untuk mendongkrak kontribusi sektor pertanian Indonesia terhadap perekonomian dengan mensosialisasikan sistem agrobisnis, diferensiasi pertanian, diversifikasi pertanian dengan membuka lahan pertanian baru, sistem pertanian organik, berbagai kebijakan harga dan

subsidi pertanian, kebijakan tentang ekspor-impor komoditas pertanian dan lain-lain.

Sistem pertanian organik khususnya, telah dicanangkan pemerintah sejak akhir tahun 90-an dan mengusung Indonesia Go Organik pada tahun 2010, sistem ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pertanian mengingat rusaknya kesuburan tanah akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dan dalam waktu lama serta pencemaran lingkungan oleh penggunaan pestisida kimia. Semua upaya pemerintah tersebut bertujuan untuk meningkatkan distribusi pendapatan petani sehingga dengan ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian.

Secara umum investasi merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi yang dapat diharapkan agar perekonomian dapat menghasilkan keuntungan. Investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau investor- investor dapat berupa pembelian barang-barang modal riil untuk mendirikan perusahaan baru maupun untuk memperluas usaha yang telah ada.

Investasi memiliki indikator yang mempengaruhi yaitu secara garis besar adalah suku bunga. Jika pertumbuhan ekonomi di suatu daerah pincang atau tidak merata maka akan sulit menarik para investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut.

Perekonomian Indonesia memiliki struktur penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Selama periode tahun 2002-2009 penduduk Indonesia banyak menggantungkan pendapatan hidupnya pada sektor pertanian.

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa perkembangan output sektor pertanian di Indonesia selama kurun waktu 2002-2010 terus mengalami pertumbuhan yang positif, terlihat dari perkembangan output sektor pertanian mulai pada tahun 2002 sebesar Rp 281.325 milyar terus meningkat hingga tahun 2009 menjadi sebesar Rp 858.252 milyar. Hal ini kemungkinan disebabkan sistem perekonomian Indonesia yang terus membaik.

Tabel 1
Perkembangan PDB Sektor Pertanian Indonesia
Tahun 2002-2010

Tahun	PDB (Milyar Rp)	Pertumbuhan (%)
2002	281.325,0	-
2003	305.783,5	8,69
2004	331.553,0	8,43
2005	365.559,6	10,26
2006	433.223,4	18,51
2007	541.931,5	25,09
2008	716.065,3	32,13
2009	858.252,0	19,86
2010	488.624,2	-43,07

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Pertumbuhan output sektor pertanian tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu 32,13 persen, hal ini kemungkinan disebabkan oleh semakin besarnya peran pemerintah dalam memajukan sektor pertanian karena sektor ini memiliki keterkaitan yang sangat luas dengan sektor-sektor lain dalam perekonomian Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai pada sektor pertanian di Indonesia tidak terlepas dari indeks harga pedagang besar sektor pertanian dan peningkatan investasi pada sektor pertanian, hal ini dapat dilihat dari tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2
Investasi Sektor Pertanian, dan Indeks Harga Pedagang Besar
Sektor Pertanian di Indonesia Tahun 2002-2010

Tahun	Investasi Sektor Pertanian		Indeks Harga Pedagang Besar Sektor Pertanian	
	Milyar Rp	Pertumbuhan (%)	Ribu Rp	Pertumbuhan (%)
2002	5.556,4	-	125	-
2003	3.443,5	-38,03	130	4.00
2004	4.910,8	42,61	137	5.38
2005	10.493,5	113,68	148	8.03
2006	8.497,9	-19,02	172	16.22
2007	6.412,8	-24,54	214	24.42
2008	2.928,1	-54,34	275	28.50
2009	4.111,9	40,43	336	22.18
2010	16.366,1	298,02	231	-31.25

Sumber : BPS, Statistik Indonesia, data diolah

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa realisasi investasi untuk sektor pertanian di Indonesia pada tahun 2002-2010 terakhir cenderung berfluktuasi bahkan cenderung menurun. Hal ini kemungkinan disebabkan karena investasi disektor pertanian selama ini dianggap kurang memberikan keuntungan baik bagi target pendapatan pemerintah maupun swasta domestik dan asing serta keadaan makro Indonesia yang juga berfluktuasi dari tahun ke tahunnya.

Perkembangan pertumbuhan investasi pada sektor pertanian di Indonesia yang terendah terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar -54,34 persen. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh krisis global yang terjadi pada tahun itu, sehingga terjadi *capital flow* (larinya modal keluar negeri) akibat adanya sedikit kepanikan dari sebagian investor yang menarik modalnya.

Sedangkan perkembangan pertumbuhan investasi pertanian tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 298,02 persen, hal ini kemungkinan

disebabkan pengaruh kebijakan pemerintah untuk meningkatkan hasil dan kualitas pertanian di Indonesia melalui revitalisasi pertanian.

Berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2 dapat diketahui bahwa kenaikan sektor pertanian berpengaruh terhadap kenaikan investasi pada sektor pertanian. Terlihat pada tahun 2005, terjadi pertumbuhan output sektor pertanian sebesar 10,26 persen, berimbang pada peningkatan pertumbuhan investasi sektor pertanian sebesar 113,68 persen. Akan tetapi kenaikan output sektor pertanian tidak selalu meningkatkan investasi sektor pertanian di Indonesia, hal itu terlihat pada tahun 2006 pertumbuhan output sektor pertanian meningkat sebesar 18,51 persen sedangkan investasi sektor pertanian mengalami penurunan sebesar -19,02 persen. Kondisi serupa juga terjadi pada tahun 2007 pertumbuhan output sektor pertanian meningkat sebesar 25,09 persen, sedangkan investasi pada sektor pertanian mengalami penurunan sebesar -24,54 persen. Dan pada tahun 2010 terjadi penurunan output sektor pertanian sebesar -43,07 persen, tetapi terjadi kenaikan investasi sektor pertanian sebesar 298,02 persen.

Pada Tabel 2 juga dapat dilihat perkembangan indeks harga pedagang besar sektor pertanian di Indonesia selama kurun waktu 2002-2010 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan indeks harga menunjukkan angka positif dari tahun 2002 sampai 2009, dengan peningkatan yang bervariasi. Indeks tertinggi yaitu pada tahun 2009 sebesar 336 dengan tingkat pertumbuhan 22,18 persen. Hal ini kemungkinan disebabkan pengaruh kebijakan pemerintah untuk meningkatkan hasil dan kualitas

pertanian di Indonesia. Sedangkan, pertumbuhan indeks harga yang terendah tahun 2010, peningkatan sebesar -31.25 persen dari tahun sebelumnya, dengan nilai indeks harga 231, hal ini kemungkinan disebabkan meningkatnya impor barang pertanian yang harganya dibawah harga dalam negeri

Tinggi rendahnya tingkat indeks harga pedagang besar sektor pertanian diduga mempengaruhi besarnya investasi sektor pertanian. Terlihat pada Tabel 2 tahun 2007 tingkat pertumbuhan indeks harga pedagang besar sektor pertanian meningkat sebesar 24,42 persen. Peningkatan indeks harga pedagang besar sektor pertanian stabil disuatu negara biasanya akan menaikkan minat investor untuk menanamkan modalnya. Tapi pada tahun yang bersamaan investasi sektor pertanian justru mengalami penurunan sebesar -24,53 persen. Kondisi serupa juga terjadi pada tahun 2008, pertumbuhan indeks harga pedagang besar sektor pertanian meningkat sebesar 28,50 persen, sedangkan pertumbuhan investasi pada sektor pertanian menurun sebesar -54,34 persen. Hal ini kemungkinan disebabkan terlalu tingginya peningkatan harga yang dipicu krisis sehingga mengurangi permintaan konsumen, yang memaksa para investor untuk menurunkan produksi, dan juga faktor lainnya yang memicu turunnya investasi pada sektor pertanian.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai sejauhmana variabel-variabel tersebut mempengaruhi investasi pada sektor pertanian, maka penulis memilih judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi Sektor Pertanian di Indonesia”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu :

1. Output sektor pertanian berpengaruh terhadap investasi sektor pertanian di Indonesia.
2. Indeks harga perdagangan besar sektor pertanian berpengaruh terhadap investasi sektor pertanian di Indonesia.
3. Minat investor berpengaruh terhadap investasi sektor pertanian di Indonesia.
4. Krisis global berpengaruh terhadap investasi sektor pertanian di Indonesia.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas pada penelitian ini pada faktor-faktor yang mempengaruhi investasi pada sektor pertanian di Indonesia terdiri atas variabel ; (1) Output sektor pertanian (2) Indeks harga pedagang besar sektor pertanian (3) Kebijakan pemerintah sektor pertanian dan pengaruhnya terhadap investasi pada sektor pertanian di Indonesia.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sejauhmana pengaruh output sektor pertanian terhadap investasi sektor pertanian di Indonesia?

2. Sejahterama pengaruh indeks harga pedagang besar sektor pertanian terhadap investasi sektor pertanian di Indonesia?
3. Sejahterama pengaruh kebijakan pemerintah sektor pertanian terhadap investasi sektor pertanian di Indonesia?
4. Sejahterama pengaruh output sektor pertanian, indeks harga pedagang besar sektor pertanian dan kebijakan pemerintah sektor pertanian terhadap investasi sektor pertanian di Indonesia?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Pengaruh output sektor pertanian terhadap investasi sektor pertanian di Indonesia.
2. Pengaruh indeks harga pedagang besar sektor pertanian terhadap investasi sektor pertanian di Indonesia.
3. Pengaruh kebijakan pemerintah sektor pertanian terhadap investasi sektor pertanian di Indonesia.
4. Pengaruh output sektor pertanian, indeks harga pedagang besar sektor pertanian dan kebijakan pemerintah sektor pertanian terhadap investasi sektor pertanian di Indonesia.

F. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat berharap agar hasil penelitian yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut :

1. Bagi penulis sendiri sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Pengembangan ilmu ekonomi khususnya Ilmu Ekonomi Pembangunan.
3. Bagi Perguruan Tinggi untuk dapat meningkatkan peran Perguruan Tinggi sebagai penyumbang, memberi gagasan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.
4. Peneliti lebih lanjut, terutama yang meneliti investasi sektor pertanian penelitian ini sebagai referensinya.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Konsep dan Teori Investasi

Naik turunnya investasi di Indonesia menunjukkan tingkat kepercayaan pihak investor terhadap ekonomi Indonesia. Menurut Samuelson dan Nordhaus (2004:138), investasi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh para penanam modal yang menyangkut penggunaan sumber-sumber seperti peralatan, gedung, peralatan produksi dan mesin-mesin baru lainnya atau persediaan yang diharapkan akan memberikan keuntungan dari investasi tersebut.

Investasi juga dapat diartikan sebagai pembelian barang yang nantinya akan digunakan untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa. Investasi adalah jumlah dari pembelian peralatan modal, persediaan, dan bangunan atau struktur. Investasi pada bangunan mencakup pengeluaran untuk mendapatkan tempat tinggal baru. Menurut kesepakatan bersama, pembelian tempat tinggal baru merupakan satu bentuk pembelajaran rumah tangga yang dikategorikan sebagai investasi dan bukan sebagai konsumsi (Mankiw, 2002:12).

Investasi merupakan unsur PDB yang paling sering berubah. Ada tiga bentuk pengeluaran investasi yaitu investasi tetap bisnis, investasi tetap residensial dan investasi persediaan. Investasi tetap bisnis adalah

pembelian pabrik dan peralatan baru oleh perusahaan, investasi residensial adalah pembelian rumah baru oleh rumah tangga dan tuan tanah investasi persediaan adalah peningkatan dalam persediaan barang perusahaan (Mankiw, 2002:453)

Menurut Samuelson (2004:139-140), ada beberapa faktor penentu tingkat investasi yaitu *revenue* yang dihasilkan oleh investasi (terutama dipengaruhi oleh GDP), biaya investasi (ditentukan oleh suku bunga dan kebijakan perpajakan), dan ekspektasi masa yang akan datang. Karena penentu-penentu investasi sangat bergantung pada kejadian-kejadian masa yang akan datang dan tidak dapat diramalkan investasi menjadi komponen yang paling mudah berubah dari pengeluaran agregat.

Dalam Mulyati (2005:14), investasi atau penanaman modal dapat dibagi sebagai berikut :

- a. PMDN
PMDN diatur dengan undang-undang no.6 tahun 1968 dan no 12 tahun 1970, tentang penanaman modal dalam negeri
- b. PMA
PMA dalam undang- undang no 1 tahun 1967 dan undang-undang no 11 tahun 1970 tentang penanaman modal asing.
- c. Penanaman modal diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri sesuai dengan fungsi dan tugas materi yang membidanginya.

Investasi secara keseluruhan dalam suatu negara merupakan gabungan dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA) dan penanaman modal diatur oleh undang-undang.

Masing-masing sumber ini akan memberikan kontribusi secara kolektif terhadap investasi total.

Menurut UU No 25 tahun 2007 pasal 1 membedakan penanaman modal menjadi dua yaitu:

- a. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
- b. Penanam modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Dengan adanya penanaman modal dalam dan luar negeri dapat meningkatkan pembangunan dan memajukan suatu daerah, pengerahan modal ini digunakan untuk investasi, dimana investasi itu ada yang berasal dari pemerintah dan swasta.

Investasi dapat juga didefinisikan sebagai tambahan bersih terhadap stok kapital (*capital stock*). Istilah lain dari investasi adalah akumulasi modal (*capital accumulation*) atau pembentukan modal (*capital formation*). Dengan demikian, di dalam makro ekonomi pengertian investasi atau akumulasi modal itu adalah berbeda atau tidak sama dengan modal (*capital*) (Nanga, 2001:124).

Investasi sering disebut dengan penanaman modal, yaitu satu komponen untuk menentukan tingkat pengeluaran agregat. Investasi adalah pengeluaran atau pembelanjaan penanaman-penanaman modal atau

perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 2004:121).

Jadi investasi merupakan suatu pengeluaran yang dilakukan untuk meningkatkan atau mempertahankan persediaan barang modal. Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi Investasi merupakan salah satu komponen utama. Dengan arti kata besarnya laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai ditentukan juga oleh besarnya investasi yang dilakukan.

Dengan adanya investasi dalam perekonomian tersebut, maka akan terjadi pertumbuhan produksi barang-barang dan jasa yang telah ada karena membawa pengaruh terhadap konsumsi masyarakat. Sebab dengan adanya investasi tersebut, terutama dalam penambahan tenaga kerja yang berarti penambahan pengeluaran perusahaan untuk pembayaran upah dan gaji dengan perubahan pendapatan tersebut akan menambah pengeluaran masyarakat untuk konsumsi yang seiring bertambahnya jumlah barang-barang yang ada dalam perekonomian.

Investasi atau penanaman modal terjadi karena adanya keputusan dari satu manajemen untuk melakukan penanaman modalnya, dengan menggunakan pertimbangan yang matang berdasarkan tujuan tertentu. Tujuan investasi dalam suatu keputusan untuk investasi yang berbunyi keputusan investasi merupakan pengorbanan uang yang ada, dikonversikan dengan memperhitungkan segala resiko.

Investasi dalam kegiatan ekonomi mempunyai arti luas. Investasi selalu dikaitkan dengan kegiatan menanamkan uang dalam proses produksi, dengan harapan mendapatkan keuntungan atau peningkatan kualitas sistem produksi pada masa yang akan datang. Berdasarkan konsep pendapatan investasi adalah total pembentukan modal tetap bruto dan perubahan stok, baik itu barang setengah jadi maupun barang jadi.

Investasi dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, menurut Keynes dua faktor penting yang menentukan investasi, yaitu : suku bunga dan ekspektasi masa depan mengenai keadaan kegiatan ekonomi. Disamping itu ahli-ahli ekonomi menekankan juga kemajuan teknologi sebagai salah satu faktor penting yang menentukan investasi (Sukirno, 2000:106).

Teori yang berhubungan dengan investasi antara lain:

a. Pandangan Ahli Klasik

Ahli klasik berkeyakinan bahwa kesempatan kerja penuh akan selalu tercapai dalam perekonomian, tidak terdapat kekurangan permintaan karena penawaran akan menciptakan permintaan itu sendiri. Apabila perekonomian menghasilkan barang dan jasa, kegiatan itu akan mewujudkan pendapatan kepada faktor-faktor produksi. Sebagian pendapatan ini akan digunakan untuk konsumsi sebagian lagi akan digunakan untuk menabung. Tetapi tabungan pada akhirnya akan dibelanjakan karena uang akan digunakan pengusaha untuk investasi.

b. Pandangan Keynes

Investasi digolongkan sebagai komponen pembelanjaan agregat yang bersifat otonom yaitu tingkat investasi yang berlaku tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Ini berarti pendapatan nasional bukan penentu utama investasi tetapi pendapatan tetap mempengaruhi.

Menurut pandangan Keynes investasi tergantung pada efisiensi marginal dari investasi dan tingkat suku bunga. Efisiensi marginal dari investasi merupakan tingkat hasil yang diharapkan dari investasi baru. Bila tingkat laba tinggi, perusahaan akan melakukan investasi lebih banyak (Jhingan, 2004:133)

c. Pandangan Neo Klasik

Menurut pandangan Neo Klasik dalam Sukirno (2000:486) faktor yang mempengaruhi investasi adalah suku bunga, tingkat depresi, tingkat pendapatan nasional, barang modal yang tersedia, kebijakan pemerintah dan semua faktor lain yang mempengaruhi investasi itu di suatu wilayah.

Kebijakan publik digambarkan sebagai suatu keputusan berdasarkan hubungan kegiatan yang dilakukan oleh aktor politik guna menentukan tujuan dan mendapat hasil berdasarkan pertimbangan situasi tertentu. Pangan merupakan suatu yang vital bagi kelangsungan Negara terutama sebagai bahan makanan kelangsungan hidup rakyat. Oleh karena pentingnya pangan, dan agar terciptanya ketersediaan pangan maka harus dibuat kebijakan yang mengatur tentang pangan.

Investasi publik yang dilakukan pemerintah melalui belanja pembangunan/belanja modalnya memerlukan kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Pemerintah mengatur sedemikian rupa kebijakan anggaran pengeluaran (rutin dan pembangunan) agar menunjang laju perekonomian.

Cavallo dan Daude (2008:5) mengemukakan bahwa investasi publik memberikan efek *crowd in* terhadap investasi (contoh karena pembangunan jalan atau bandara maka akan menyediakan akses bagi perusahaan-perusahaan untuk memasuki pasar), sehingga produktivitas dari modal publik harus ditingkatkan.

Musgrave (1993:590) mengemukakan bahwa investasi pemerintah dan pinjaman yang diberikan pemerintah memainkan peran strategis dalam pembangunan. Konsep pengadaaan modal oleh pemerintah harus diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga meliputi juga investasi dalam sumber daya manusia yang akan meningkatkan produktivitas.

Jadi investasi publik merupakan bagian dari kebijakan pengeluaran pemerintah, dimana anggaran belanja yang dimiliki oleh pemerintah dibelanjakan untuk keperluan pembangunan (investasi) terhadap kepentingan masyarakat banyak (publik). Investasi pemerintah ini berfungsi untuk mendorong dan mendukung perkembangan dunia usaha selain itu juga untuk stabilisasi kegiatan ekonomi.

2. Ruang Lingkup dan Ciri-Ciri Umum Pertanian

Sektor pertanian meliputi kegiatan pengusaha dan pemanfaatan benda-benda biologis (hidup) yang diperoleh dari alam dengan tujuan

untuk konsumsi. Menurut BPS (2011) Berdasarkan definisi ini, sektor pertanian dapat diperinci lagi atas beberapa sub sektor. Hal ini dapat diuraikan satu-persatu, yaitu:

a. Sektor Tanaman Bahan Makanan (*Farm Food Ceres*)

Mencakup segala jenis makanan yang dihasilkan dan dipergunakan sebagai bahan makanan seperti, padi, jagung, ketela pohon, kentang dan umbi-umbian lainnya, kacang tanah, kedelai, dan kacang lainnya, sayur dan buah-buahan.

b. Tanaman Perkebunan.

Mencakup segala jenis tanaman perkebunan yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan seperti karet, kopi, the kina, coklat, kelapa sawit, tebu, serat manila, kelapa, kapuk, cengkeh, pala, lada, pinang dan lainnya.

c. Peternakan.

Mencakup kegiatan pemeliharaan ternak besar, ternak kecil, dan unggas yang bersifat komersial dengan tujuan untuk dikembangkan, dipotong dan diambil hasilnya seperti; sapi, kerbau, kuda, babi, kambing, domba, ayam, itik, burung, ulat sutra dan sebagainya.

d. Kehutanan.

Mencakup kegiatan yang dilakukan di areal hutan oleh perorangan atau badan usaha, yang mencakup usaha penanaman, pemeliharaan, penanaman kembali, dan penebangan hutan serta pengambilan getah-getahan dan akar-akaran, produksi yang dihasilkan mencakup kayu

glondongan, kayu belahan (pertukangan), kayu bakar, bambu, rotan dan damar.

e. Perikanan.

Mencakup kegiatan penangkapan, pengambilan dan pemeliharaan/pembiayakan segala jenis binatang dan tumbuhan air baik air tawar maupun air asin, seperti: udang, ikan, kepiting, rumput laut, mutiara dan lainnya. Menurut tempat penangkapannya subsektor perikanan dibagi menjadi perikanan laut dan perikanan darat. Perikanan darat terdiri dari perikanan air tawar (kolam, sawah, danau dan sungai) dan perikanan air tambak/paya.

Dari lima lingkup sub sektor pertanian yang dijabarkan di atas menggambarkan bahwa sektor pertanian memiliki sub sektor yang potensial dan mempunyai peranan yang strategis dalam perekonomian Indonesia yang masih didominasi oleh sektor pertanian. Serta masih banyaknya penduduk Indonesia yang menggantungkan pendapatan hidupnya pada sektor pertanian.

Agar berhasilnya suatu pembangunan pertanian diperlukan beberapa syarat atau pra kondisi yang untuk tiap-tiap negara atau daerah berbeda-beda. Pra kondisi ini meliputi bidang-bidang teknis, ekonomis, sosial budaya dan lainnya. AT Mosher dalam Lincolin (2000:333-336) “Telah menggolongkan syarat agar berhasilnya pembangunan pertanian menjadi syarat mutlak dan syarat pelancar”.

Syarat mutlak antara lain adalah :

- a. Adanya pasar untuk hasil usaha tani.

- b. Teknologi yang senantiasa berkembang.
- c. Tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal.
- d. Adanya perangsang produksi bagi petani.
- e. Tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontiniu.

Syarat pelancar adalah syarat :

- a. Pendidikan pembangunan.
- b. Kredit produksi.
- c. Kegotong -royongan petani.
- d. Perbaikan dan perluasan tanah pertanian.
- e. Perencanaan nasional dari pada pembangunan pertanian.

Dari kesepuluh syarat-syarat yang telah dikemukakan di atas, berdasarkan pengalaman pembangunan pertanian di negara kita, membawa kita pada kesimpulan bahwa sebenarnya iklim pembangunan yang merangsang adalah kunci utama. Iklim yang merangsang bagi pembangunan pertanian telah dapat tercipta dimana dengan penekanan terhadap sektor pertanian pada Repelita pertama menghasilkan swasembada pangan yang utamanya adalah beras pada era 80-an.

Kebijakan pembangunan pangan di Indonesia, sebagaimana hampir seluruh negara di dunia, mengikuti konsep ketahanan pangan (food insecurity). Hal ini tercermin dari kebijakan yang telah diterbitkan, salah satunya dalam UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan. Dalam UU tersebut, ideologi ketahanan pangan mewarnai hampir seluruh isi undang-undang. Hal yang terus disinggung dalam UU tersebut adalah aspek pemenuhan dan kecukupan bahan pangan bagi masyarakat. UU tersebut tidak mempersoalkan bagaimana bahan pangan itu didapat dan dengan cara apa, termasuk impor besar-besaran sekalipun. Hal ini menjadikan Indonesia

memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada produk-produk pangan impor.

Jika kita menilik sejarah lahirnya UU ini. Perlu dicermati bahwa *setting* waktu kelahiran UU Pangan saat itu berdekatan dengan *World Food Summit* (WFS) 1996 yang diselenggarakan oleh FAO. Dimana salah satu resolusi yang dikeluarkan (resolusi No.176/1996) antara lain berisi komitmen untuk mengimplementasikan suatu konsep *food security* sebagai suatu upaya untuk mengatasi bahaya kelaparan yang menimpa dunia. Oleh karenanya, wajar jika dalam UU Pangan, *food security* lebih dominan sebagai “spirit” penyusunan UU, dibandingkan konsep kedaulatan pangan.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi Sektor Pertanian

a. Output Sektor Pertanian

Dalam penelitian ini, nilai output yang digunakan adalah nilai Produk Domestik Bruto. Menurut Mankiw (2002:6) Produk Domestik Bruto merupakan nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir (final) yang diproduksi dalam sebuah negara dalam satu periode.

Produk Domestik Bruto juga bisa diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu tahun tertentu dengan menggunakan faktor-faktor produksi milik warga negaranya dan milik penduduk di negara-negara lain. Biasanya dinilai menurut harga pasar dan dapat didasarkan kepada harga yang berlaku dan harga tetap. (Sukirno, 2004:61)

Mankiw (2002:21) membedakan GDP menjadi dua yaitu:

a. GDP Nominal

Mengukur output yang dinilai pada harga berlaku dari output perekonomian.

$$\mathbf{GDP\ Nominal = GDP\ Rill\ x\ Deflator\ GDP}$$

Dimana Deflator GDP mengukur harga output relatif terhadap harganya pada tahun dasar.

b. GDP Rill

Mengukur output yang dinilai pada harga konstan. GDP Rill ini menunjukkan apa yang akan terjadi terhadap pengeluaran atas output jika jumlah berubah tetapi harga tidak naik.

$$\mathbf{GDP\ Rill = \frac{GDP\ Nominal}{Deflator\ GDP}}$$

Untuk menghitung Produk Domestik Bruto (GDP) adalah dengan mengurangi atau mengeluarkan pendapatan yang diperoleh oleh tenaga kerja dan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh suatu negara dan terdapat di negara lain, dan kemudian baru ditambahkan pendapatan yang diperoleh oleh tenaga kerja dan faktor-faktor produksi lainnya yang dimiliki oleh orang asing (WNA) dan terdapat di dalam negeri.

GDP merupakan pengukur yang paling luas dari total output barang dan jasa suatu negara. Ini merupakan jumlah nilai dollar konsumsi (C), investasi bruto (I), pembelanjaan pemerintah atas barang dan jasa (G), dan ekspor netto (X) yang dihasilkan di dalam suatu Negara selama satu tahun tertentu. (Samuelson, 2004:99)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PDB berpengaruh signifikan terhadap penanaman modal (investasi), apabila PDB meningkat maka, secara otomatis akan terjadi peningkatan pada penanaman modal dan begitu sebaliknya, apabila terjadi penurunan

terhadap PDB maka penanaman modal akan mengalami penurunan pula.

b. Indeks Harga Pedagang Besar Sektor Pertanian

Suatu indeks harga merupakan rata-rata penimbang harga dari sejumlah barang dan jasa. Dalam menyusun indeks-indeks harga, para ekonom menimbang harga-harga individu menurut kepentingan ekonomi dari setiap barang. (Samuelson and Nordhaus , 2004:118)

Menurut Dornbusch and Fisher (2008:40-41), Indeks harga yang utama ialah deflator PDB, indeks harga konsumen, deflator pengeluaran konsumsi personal, dan indeks harga produsen.

1) Deflator PDB

Deflator PDB adalah rasio PDB nominal di tahun tertentu terhadap PDB riil tahun tersebut. Karena deflator PDB berdasarkan pada perhitungan yang mengandung seluruh barang yang diproduksi dalam perekonomian, maka adalah indeks harga yang berbasis luas yang seringkali digunakan untuk mengukur inflasi.

2) Indeks Harga Konsumen (IHK)

Mengukur biaya pembelian sekelompok tetap barang dan jasa yang merepresentasikan pembelian konsumen perkotaan.

3) Deflator Pengeluaran Konsumsi Personal (PKP)

Mengukur inflasi dalam pembelian konsumen berdasarkan sektor konsumsi dalam perhitungan pendapatan nasional. Karena ini

merupakan indeks berantai, federal reserve seringkali focus pada indikator ini dibandingkan IHK.

4) Indeks Harga Produsen (IHP)

Adalah indeks harga ketiga yang banyak digunakan. Seperti IHK, IHP mengukur biaya sekelompok barang. Tetapi tetap berbeda dengan IHK dalam hal cakupan, misalnya dengan dimasukan bahan baku dan barang setengah jadi. IHP juga berbeda karena ia didesain untuk mengukur harga pada tahap awal dari sistem distribusi. Sementara IHK mengukur harga dimana rumah tangga perkotaan secara aktual melakukan pengeluaran, yaitu di tingkat eceran, IHK dibangun dari harga pada tingkat transaksi perdagangan pertama. Ini yang membuat IHP sebagai indeks yang relatif lebih fleksibel dan sering kali menjadi tanda perubahan di tingkat harga umum. Dengan alasan ini, IHP terutama beberapa subindeksnya seperti indeks barang-barang sensitif sering dijadikan indikator siklus bisnis yang sangat diperhatikan oleh para pembuat kebijakan.

Dalam menetapkan nilai indeks harga empat indikator di atas, merupakan acuan utama yang digunakan dalam pengkajian fenomena ekonomi seperti inflasi, harga produk dan biaya pembelian. Dengan tujuan sebagai tolak ukur bagi pengabilan kebijakan dalam perekonomian suatu negara oleh pemerintah.

Indeks harga suatu produk seringkali didasarkan pada nilai indeks harga yang diterima oleh produsen (IHP). Perkembangan yang berlangsung pada nilai indeks harga setidaknya mewakili penilaian pertimbangan potensi keuntungan dari suatu produk lewat sisi mikro. Artinya variabel harga secara ekonomi mendapatkan porsi yang besar dalam menilai suatu produk yang dapat memberikan kesejahteraan baik bagi para produsen maupun konsumen, seperti yang diteliti dalam studi ini adalah variabel harga. Dalam kaitannya dengan investasi pertanian, variabel harga yang menjadi perhatian dan pertimbangan langsung adalah ‘kualitas’ harga-harga yang diterima oleh pelaku sektor pertanian, baik petani kecil, menengah maupun petani besar.

Dilain pihak menurut BPS, Indeks Harga Perdagangan Besar merupakan salah satu indikator inflasi berdasarkan *international best practice*. Harga Perdagangan Besar dari suatu komoditas ialah harga transaksi yang terjadi antara penjual/pedagang besar pertama dengan pembeli/pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama atas suatu komoditas. (<http://bi.go.id>)

Beberapa penelitian mengenai investasi didapat baik tingkat harga penjualan maupun laba total merupakan faktor-faktor yang menjelaskan tingkat investasi. Tingkat harga penjualan tersebut dapat mencerminkan sebagai suatu harapan-harapan mengenai output dimasa depan yang selanjutnya dapat mempengaruhi apakah proyek

tersebut memerlukan perluasan usaha atau bahkan investasi-investasi baru. (Dornbusch and Fisher, 2008:192)

Jadi dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya tingkat indeks harga akan mempengaruhi kemauan investor untuk berinvestasi. Hal ini disebabkan, karena tingkat harga penjualan dapat mencerminkan sebagai suatu harapan-harapan mengenai output dimasa depan yang selanjutnya dapat mempengaruhi investasi.

c. **Kebijakan Pemerintah Sektor Pertanian**

Kebijakan pertanian adalah serangkaian tindakan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan umum kebijakan pertanian kita adalah memajukan pertanian, mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif, produksi dan efisiensi produksi naik dan akibatnya tingkat penghidupan dan kesejahteraan petani meningkat. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, pemerintah baik di pusat maupun di daerah mengeluarkan peraturan-peraturan tertentu; ada yang berbentuk Undang-undang, Peraturan-peraturan Pemerintah, Kepres, Kepmen, keputusan Gubernur dan lain-lain.

Produktivitas pertanian, baik di pemerintahan pusat, provinsi, maupun kabupaten dapat ditingkatkan melalui investasi pada sektor pertanian dengan menggunakan instrument kebijakan harga, kebijakan makroekonomi, dan kebijakan investasi publik. Kebijakan makroekonomi hanya bisa diterapkan pada tingkat pusat dan

memerlukan analisis tersendiri oleh para ahli ekonomi makro. Sementara di pihak lain, para ahli ekonomi pertanian melakukan pengkajian tentang pengaruh kebijakan harga dan kebijakan investasi.

Namun demikian, dampak kebijakan harga dan kebijakan investasi pertanian dapat dikaji melalui pendekatan yang sama, yaitu *Policy Analysis Matrix* (PAM). Hasil analisis PAM ini dapat menunjukkan pengaruh individual maupun kolektif dari kebijakan harga dan kebijakan faktor domestik. PAM juga memberikan baseline information yang penting bagi *Benefit-Cost Analysis* untuk kegiatan investasi di bidang pertanian (Pearson dkk., 2005)

Menurut Carl Friedrich (1997) dalam Wahab bahwa:

“Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan yang diinginkan.”

Setelah memaparkan makna kebijakan, maka secara sederhana kebijakan publik digambarkan sebagai suatu keputusan berdasarkan hubungan kegiatan yang dilakukan oleh aktor politik guna menentukan tujuan dan mendapat hasil berdasarkan pertimbangan situasi tertentu. Pangan merupakan suatu yang vital bagi kelangsungan negara terutama sebagai bahan makanan kelangsungan hidup rakyat. Oleh karena pentingnya pangan, dan agar terciptanya keterediaan pangan maka harus dibuat kebijakan yang mengatur tentang pangan.

Para pengikut mazhab keynesian berpendapat bahwa pemerintah seharusnya melakukan intervensi melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong kesempatan kerja penuh, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi. mereka menyarankan untuk memerangi depresi dan resesi ekonomi, seharusnya dilakukan dengan cara meningkatkan belanja pemerintah atau mengurangi pajak yang dapat menambah belanja konsumsi sektor swasta. disarankan pula agar penguasa moneter menambah pasokan uang untuk menurunkan suku bunga dengan harapan agar kebijakan itu mampu mendukung belanja investasi (Komaruddin, 2004:89).

Menurut Timmer (2002), dengan tiga faktor makro ekonomi (permintaan, penawaran dan pendapatan), akan tercapai suatu keseimbangan pada tingkat harga suatu barang. Harga keseimbangan ini sewaktu-waktu juga dapat berubah sebagai akibat dari perubahan kegiatan ekonomi. Kenaikan tingkat harga (inflasi) yaitu fenomena keuangan yang ditimbulkan oleh peningkatan peredaran uang yang lebih cepat daripada peningkatan produk/output. Kebijakan moneter yang dapat mengakibatkan inflasi, bagaimana-pun, juga merupakan variabel yang mempengaruhi ekonomi. Beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi kebijakan makro antara lain adalah ketersediaan uang, suku bunga, inflasi, investasi dan distribusi pendapatan.

Kebijakan *budgeter* juga merupakan kebijakan makro ekonomi yang berhubungan dengan kebijakan pangan dan pertanian melalui

pembiayaan proyek, program dan investasi pedesaan seperti jalan, jembatan, pelabuhan dan sistem irigasi. Pada saat yang sama, kebijakan *budgeter* juga berpengaruh pada hubungan terhadap kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan harga makro, dan juga berpengaruh terhadap kebijakan pangan dan pertanian melalui kebijakan perdagangan internasional, dan nilai tukar rural-urban (Timmer, 2002).

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik.

Selain itu, pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor yang semakin rumit. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri, menimbulkan semakin tingginya tingkat pencemaran udara dan air sehingga pemerintah harus turun tangan untuk mengatur dan mengurangi akibat negatif dari polusi itu terhadap masyarakat. Pemerintah juga harus melindungi buruh yang berada dalam posisi

yang lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. (Basri, 2005)

Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun 1996 menegaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang terus berkembang dari waktu ke waktu, upaya penyediaan pangan dilakukan dengan mengembangkan sistem produksi pangan yang berbasis pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal, mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan, mengembangkan teknologi produksi pangan, mengembangkan sarana dan prasarana produksi pangan dan mempertahankan serta mengembangkan lahan produktif.

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Hasil penelitian sejenis ini merupakan bagian yang menguraikan tentang beberapa pendapat/hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Di bawah ini dikemukakan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan dilapangan diantaranya:

1. Joni Hendra Putra (2011) yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi Domestik di Indonesia”. Menyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara variabel bebas yaitu Pendapatan Nasional, Inflasi dan Suku Bunga dengan variabel terikatnya yaitu Investasi Domestik sebesar 84,80 Persen.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2010) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing di Indonesia”. Penelitian ini menjelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi PMA di Indonesia. Variabel bebasnya adalah PDB, tingkat suku bunga, tingkat upah, dan krisis ekonomi sedangkan variabel terikatnya adalah penanaman modal asing di Indonesia. Hasil penelitiannya adalah PDB dan krisis ekonomi berpengaruh positif terhadap penanaman modal asing di Indonesia, sedangkan suku bunga dan tingkat upah berpengaruh negatif terhadap penanaman modal asing di Indonesia.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Andigan, S (2008) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi di Indonesia”. Penelitian ini menjelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi investasi di Indonesia. Variabel bebasnya adalah PDB, SBI, kurs, inflasi, dan ekspor non migas. Hasil penelitiannya adalah PDB dan ekspor non migas berpengaruh positif terhadap investasi di Indonesia, dan inflasi berpengaruh negatif terhadap investasi di Indonesia. Sedangkan SBI dan kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap investasi di Indonesia.

Dalam penelitian penulis yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Sektor Pertanian di Indonesia”, maka penulis berpendapat bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara output sektor pertanian, indeks harga pedagang besar sektor pertanian dan kebijakan

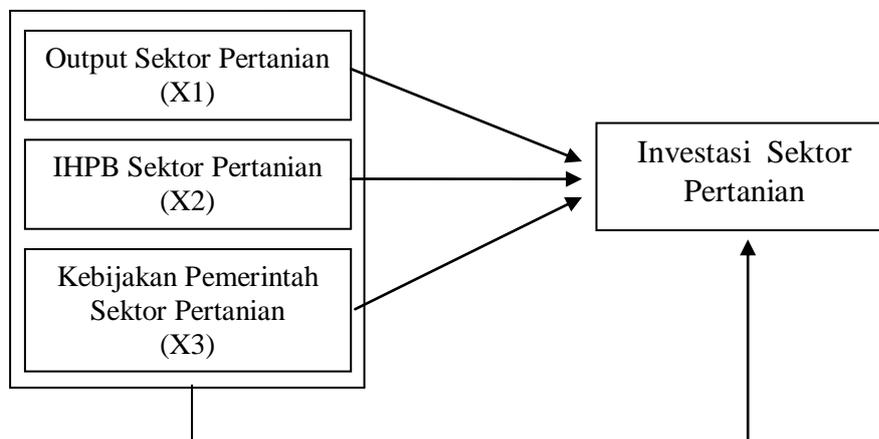
pemerintah sektor pertanian terhadap investasi pada sektor pertanian di Indonesia.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran ini dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menunjukkan persepsi keterkaitan antar variabel yang akan diteliti berdasarkan perumusan masalah. Adapun untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi investasi sektor pertanian di Indonesia dipakai beberapa variabel yang mempengaruhinya. Sebagai variabel terikat disini adalah investasi sektor pertanian (Y) dan variabel-variabel bebasnya yaitu : output sektor pertanian (X_1), indeks harga pedagang besar sektor pertanian (X_2) dan kebijakan pemerintah sektor pertanian (X_3).

Output sektor pertanian memiliki pengaruh positif dengan investasi. Apabila output sektor pertanian meningkat akan memerlukan barang modal yang semakin banyak. Dengan demikian, perlu dilakukan investasi yang lebih tinggi dan banyak barang modal yang perlu dipinjam. Tingkat indeks harga pedagang besar sektor pertanian berhubungan positif terhadap investasi. Tingkat harga penjualan dapat mencerminkan sebagai suatu harapan-harapan mengenai output dimasa depan yang selanjutnya dapat mempengaruhi investasi. Sedangkan kebijakan pemerintah sektor pertanian mempunyai pengaruh yang positif terhadap investasi sektor pertanian, karena peran pemerintah sangat diperlukan untuk meningkatkan sektor pertanian untuk menarik para investor.

Secara skematis pengaruh antar variabel-variabel bebas tersebut dalam mempengaruhi variabel terikatnya dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Sektor Pertanian di Indonesia

D. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Secara parsial, terdapat pengaruh yang signifikan antara output sektor pertanian terhadap investasi sektor pertanian di Indonesia.

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

2. Secara parsial, terdapat pengaruh yang signifikan antara indeks harga pedagang besar sektor pertanian terhadap investasi sektor pertanian di Indonesia.

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_2 \neq 0$$

3. Secara parsial, terdapat pengaruh yang signifikan antara kebijakan pemerintah sektor pertanian terhadap investasi sektor pertanian di Indonesia.

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_3 \neq 0$$

4. Secara bersama-sama, terdapat pengaruh yang signifikan antara output sektor pertanian, indeks harga pedagang besar sektor pertanian dan kebijakan pemerintah sektor pertanian terhadap investasi sektor pertanian di Indonesia.

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3$$

$$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3$$

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil penelitian data dan pembahasan terhadap hasil penelitian antara variabel bebas terhadap variabel terikat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Output sektor pertanian mempunyai pengaruh yang signifikan (Positif) terhadap investasi pada sektor pertanian di Indonesia dengan (prob = 0,0000) dan tingkat pengaruh 2,0785 persen. Semakin tinggi jumlah output sektor pertanian semakin meningkat jumlah investasi pada sektor pertanian di Indonesia.
2. Indeks harga pedagang besar sektor pertanian mempunyai pengaruh yang signifikan (negatif) terhadap investasi pada sektor pertanian di Indonesia dengan (prob = 0.0000) dan tingkat pengaruh -0,0131 persen. Semakin tinggi indeks harga pedagang besar sektor pertanian semakin menurun jumlah investasi pada sektor pertanian di Indonesia.
3. Kebijakan pemerintah sektor pertanian mempunyai pengaruh yang signifikan (positif) terhadap investasi pada sektor pertanian di Indonesia dengan (prob = 0.0000) dan tingkat pengaruh 2,2253 persen. Semakin tinggi kebijakan pemerintah sektor pertanian semakin meningkat jumlah investasi pada sektor pertanian di Indonesia.

4. Output sektor pertanian dan kebijakan pemerintah sektor pertanian mempunyai pengaruh yang signifikan (positif) terhadap investasi sektor pertanian di Indonesia, dan indeks harga pedagang besar sektor pertanian mempunyai pengaruh yang signifikan (negatif) terhadap investasi sektor pertanian di Indonesia dan kontribusi secara bersama-sama 86,437 persen. Semakin tinggi output sektor pertanian maka semakin tinggi investasi pada sektor pertanian di Indonesia dan semakin rendah indeks harga pedagang besar sektor pertanian maka semakin tinggi tingkat investasi pada sektor pertanian di Indonesia serta semakin tinggi kebijakan pemerintah sektor pertanian maka semakin tinggi investasi sektor pertanian di Indonesia.

B. Saran

Bertitik tolak dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan hasil hipotesis penelitian ini serta kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Diperlukan implementasi yang tegas terhadap perangkat peraturan yang mendukung perbaikan iklim investasi misalnya dengan menyediakan insentif, menjamin iklim yang kondusif bagi penanam modal sehingga mampu mendorong investor untuk menanamkan modalnya disektor pertanian, karena besarnya investasi tahun sekarang sangat berpengaruh pada investasi pada masa yang akan datang.
2. Didapatinya pengaruh pertumbuhan output sektor pertanian yang signifikan pada permintaan investasi sektor pertanian melahirkan

konsekuensi agar pemerintah perlu mengontrol dan menetapkan perkembangan pertumbuhan output sektor pertanian sebagai salah satu penentu investasi pada sektor pertanian.

3. Pemerintah perlu menjaga kestabilan indeks harga pedagang besar sektor pertanian karena kestabilan harga produk pertanian sangat berpengaruh pada minat masyarakat mengadakan investasi disektor pertanian, misalnya dengan membangun prasarana angkutan dan jalan pedesaan untuk menjamin akses produk pertanian kepusat konsumen dan perdagangan yang akan memudahkan dan mengurangi biaya produksi, sehingga akan berpengaruh pada harga akhir produk pertanian.
4. Pemerintah perlu melakukan revitalisasi berbagai sarana pendukung sektor pertanian, dan pembukaan lahan baru sebagai tempat yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Komaruddin, (2004). *“Dasar-dasar Manajemen Investasi dan Portofolio”*. Edisi Revisi. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Akhirmen. (2005). *Buku Ajar Statistika 1*. Padang. FE UNP.
- Andigan, Simangunsong (2008). *“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi di Indonesia”* Medan: USU
- Arsyad , Lincolin. (2000). *“Ekonomi Pembangunan”*. Yogyakarta: STIE-YPKN.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia 2000-2009*. Padang.
- Basri, Faisal. (2005). *“Lanskap Ekonomi Indonesia”*. Jakarta: Kencana.
- Boediono, (2005). *“Ekonomi Moneter,”*. Yogyakarta, BPFE
- Cash, Fair (2004). *”Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro”*. Jakarta: PT. Indeks Kelmpok Gramedia.
- Dornbusch, Rudrigger and Fisher, Stanley. (2008). *“Macroeconomics, Edisi Terjemahan”*, 6th, ed International Edition, McGraw-Hill. Inc
- Gujarati, Damodar. (2003). *“Ekonometrika Dasar”*. (Terjemahan Sumarni Zein). Jakarta: Erlangga.
- _____. (2006). *“Ekonometrika Dasar”*. (Terjemahan Sumarni Zein) Jakarta: Erlangga.
- Jhingan, ML. (2004). *“Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan”*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mankiw, N Gregory. (2002). *“Pengantar Ekonomi Makro”*. Jakarat: Salemba Empat.
- Monke. E.A. and S.Pearson (2005). *The Policy Matrix for Agricultural Development*. Cornell University Press. London.
- Mulyati, (2005), *“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi Domestik di Indonesia”*. Fakultas Ekonomi UNP, Padang. (Skripsi) (tidak dipublikasikan)